

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Teori Pertumbuhan Wilayah

Wilayah merupakan suatu hamparan luas sebagai kumpulan dari lokasi-lokasi (sites) atau areal-arela (areas), baik mencakup ciri perkotaan ataupun perdesaan (Sadyohutomo, 2008: 4). Wilayah ini selalu mengalami pertumbuhan baik dalam aspek ekonomi, sosial ataupun lingkungannya. Seiring dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, teori mengenai pertumbuhan wilayah ini pun mengalami perkembangan sehingga menghasilkan berdasarkan beberapa teori pertumbuhan. Berikut merupakan penjelasan mengenai teori pertumbuhan wilayah yang terus berkembang.

##### 2.1.1 Teori *Resource Endowment*

Teori pertumbuhan wilayah ini menyatakan bahwa pengembangan ekonomi wilayah tergantung pada SDA yang dimiliki dan permissan terhadap komoditas yang dihasilkan dari sumber daya. Sumber daya yang dimiliki merupakan asset untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan. Suatu sumber daya menjadi berharga jika dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam bentuk produksi barang lainnya. Teori *resources endowment* secara implisit mengasumsikan bahwa sumber daya yang dimiliki akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa yang berbeda bila terjadi perubahan permintaan. Kendala utama dari teori ini adalah pergeseran ekonomi dari pemakaian langsung sumber daya alam menuju proses pengolahan barang setengah jadi dan penyediaan jasa pelayanan dalam jangka panjang.

##### 2.1.2 Teori *Export Base*

Menurut North dalam Tunjung (2008: 159) pertumbuhan wilayah jangka panjang bergantung pada kegiatan industri ekspor yang ada. Permintaan eksternal akan barang dan jasa yang diekspor merupakan suatu kekuatan utama dalam pertumbuhan wilayah tersebut. Permintaan ini yang akan mempengaruhi penggunaan modal, tenaga kerja dan teknologi untuk menghasilkan komoditas ekspor. Suatu wilayah memiliki sektor ekspor karena menghasilkan keuntungan dalam memproduksi barang dan jasa, mempunyai lokasi pemasaran yang unik, dan mempunyai beberapa tipe keuntungan transportasi. Teori *export base* atau teori *economic*

*base* ini menekankan pentingnya keterbukaan wilayah yang dapat meningkatkan aliran modal dan teknologi yang dibutuhkan untuk kelanjutan pembangunan wilayah.

Tepri *Exsport base* memiliki daya tarik intuitif dan kesederhanaan. Perubahan pendapatan wilayah bergantung pada perubahan permintaan ekspor. Ekspor meningkat jika permintaan bergeser ke kanan atau terjadi peningkatan posisi menguntungkan ke wilayah, sedangkan ekspor menurun jika permintaan bergeser ke kiri atau kehilangan posisi menguntungkan. Hal ini menyebabkan sektor-sektor ekspor baru bermunculan karena terjadi perubahan selera.

### **2.1.3 Teori Pertumbuhan Wilayah Neoklasik**

Menurut teori Neoklasik, pertumbuhan ekonomi wilayah sangat berhubungan dengan tiga faktor penting, yaitu tenaga kerja, ketersediaan modal dan kemajuan teknologi. Tingkat dan pertumbuhan faktor-faktor itu akan menentukan tingkat pendapatan dan pertumbuhan ekonomi wilayah. Teori neoklasik menekankan pada perpindahan faktor-faktor, khususnya modal dan tenaga kerja antar wilayah. Teori neoklasik juga mengasumsikan bahwa adanya fleksibilitas faktor harga yang sempurna sehingga perpindahan tenaga kerja dan modal antar wilayah secara otomatis akan menghilangkan perbedaan-perbedaan faktor harga diantara wilayah-wilayah. Hal ini akan menyeragamkan pendapatan perkapita wilayah. Teori ini tidak memberikan penekanan yang cukup terhadap pentingnya faktor permintaan sehingga jika suatu wilayah memiliki pertumbuhan permintaan yang tinggi terhadap barang-barang produksinya akan menjadi lokasi yang baik untuk investasi dan akan menarik lebih banyak modal dan tenaga kerja dari wilayah lainnya.

### **2.1.4 Teori Ketidakseimbangan Pertumbuhan Wilayah**

Teori ini menyatakan bahwa kekuatan pasar tidak dapat menghilangkan perbedaan antar wilayah dalam suatu negara, bahkan sebaliknya cenderung menciptakan atau bahkan memperburuk perbedaan-perbedaan tersebut. Teori ketidakseimbangan ini menentang pemahaman dari teori keseimbangan neoklasik sebelumnya karena perubahan-perubahan dalam suatu system sosial tidak diikuti oleh penggantian perubahan pada arah yang berlawanan. Menurut Myrdal dalam Tunjung (2008: 161), terdapat dua kekuatan yang bekerja dalam process pertumbuhan ekonomi, efek balik negative (*backwash effect*) dan efek penyebaran (*spread effect*). Kekuatan efek penyebaran mencakup penyebaran pasar hasil produksi bagi wilayah belum berkembang, penyebaran inovasi dan teknologi. Sedangkan

kekuatan efek balik negative biasanya melampaui efek penyebaran dengan ketidakseimbangan aliran modal dan tenaga kerja dari wilayah tidak berkembang ke wilayah berkembang. Jadi interaksi antar wilayah pada system pasar bebas cenderung memperburuk kinerja ekonomi wilayah yang belum berkembang sehingga kondisi ini mengesahkan intervensi mekanisme pasar untuk mengatasi efek balik negative yang akan menimbulkan kesenjangan wilayah.

### **2.1.5 Teori Baru Pertumbuhan Wilayah**

Munculnya teori baru pertumbuhan wilayah ini mulai memperkenalkan teknis investasi secara eksplisit dan mandiri. Teori ini membuat perubahan dari dalam sehingga perubahan ini tanggap terhadap dorongan ekonomi. Romer melanjutkan penelitian sebelumnya dan menemukan suatu model pengembangan sumber daya manusia melalui perbaikan nutrisi, kesehatan, pendidikan, dan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas yang memungkinkan terjadinya pertumbuhan output. Bukti-bukti empiric menunjukan jika terdapat suatu hubungan yang positif antarukuran ketersediaan sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang dan maju.

Selanjutnya, ditemukan juga model perubahan teknologi yang endogenus yang dikembangkan dari penelitian dari seluruh pengetahuan yang ada. Pada model tersebut, peningkatan pengetahuan memberikan kontribusi terhadap peningkatan inovasi seperti juga memberikan kontribusi terhadap tingkat pertumbuhan teknologi dan ekonomi. Pandangan lain dari teori ini adalah kaitannya dengan iklim keterbukaan wilayah dalam ekonomi nasional. Keterbukaan akan memberikan keuntungan skala ekonomis, transfer teknologi dan eksternalitas positif lainnya yang diperoleh dari perdagangan antar wilayah.

## **2.2 Desa**

### **2.2.1 Desa**

Berbagai pengertian mengenai desa diungkapkan oleh beberapa ahli di Indonesia maupun luar negeri. Salah satunya, yaitu pendapat yang dikemukakan oleh Bintarto dalam Asy'ari (1993: 95) bahwa desa ialah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Sedangkan menurut Paul dalam Leibo (1995: 6) definisi desa dapat dibedakan berdasarkan maksud dan tujuan. Berdasarkan maksud statistic, pedesaan adalah tempat-tempat dengan jumlah penduduk kurang dari 2.500 jiwa kecuali disebutkan lain. Berdasarkan maksud kajian psikologis sosial, pedesaan adalah

daerah-daerah dimana pergaulannya ditandai oleh derajat intimitas yang tinggi. Sedangkan jika dilihat dari maksud kajian ekonomi, pedesaan merupakan daerah dimana pusat perhatian/kepentingan adalah pertanian dalam arti luas.

Selain itu, jika dilihat dari segi sosial budaya, desa itu tampak dari hubungan sosial antar penduduknya yang bersifat khas yakni hubungan kekeluargaan, bersifat pribadi, tidak banyak pilihan dan kurang tampak adanya pengkotaan atau dengan kata lain bersifat homogen serta bergotong royong. Sedangkan berdasarkan Permen dalam Negeri No 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendahyagunaan data Profil Desa dan Kelurahan, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **2.2.2 Kondisi Sosial Desa**

Proses perubahan sosial yang ada di setiap daerah memiliki tujuan yang sama yaitu guna mencapai kesejahteraan sosial. Menurut Rukminto (1994: 3), kesejahteraan sosial adalah berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai tingkat kehidupan masyarakat yang lebih baik. Sedangkan berdasarkan ahli sosial Walter Friedlander dalam Rukminto (1994: 4), kesejahteraan sosial merupakan sistem yang terorganisir dari institusi dan pelayanan sosial yang dirancang untuk membantu individu/keompok agar dapat mencapai standar hidup dan kesehatan yang lebih memuaskan. Selain itu, kesejahteraan sosial juga diartikan sebagai peraturan perundangan, program, tunjangan dan pelayanan yang menjamin atau memperkuat pelayanan untuk memenuhi kebutuhan yang mendasar dari masyarakat serta menjaga ketentraman masyarakat ( Elizabeth dalam Rukminto, 1994: 4). Pada penelitian ini, kegiatan sosial yang dimaksud merupakan upaya ataupun kegiatan guna mencapai kesejahteraan berupa standart kehidupan yang layak dan kesehatan yang lebih memuaskan.

Karakteristik sosial di desa dan di kota memiliki beberapa perbedaan yang sangat mendasar. Hal ini diakrenakan karaktersitik wilayahnya yang berbeda pula. Menurut Roucek dan Warren dalam Leibo (1995: 7)., penduduk desa memiliki karakteristik sosial sebagai berikut:

- a. Memiliki sifat yang homogen dalam hal mata pencaharian, nilai kebudayaan serta dalam sikap dan tingkah laku.

- b. Kehidupan di desa lebih menekankan anggota keluarga sebagai unit ekonomi.
- c. Faktor geografis sangat berpengaruh atas kehidupan yang ada, misalnya keterikatan anggota masyarakat dengan tanah atau desa kelahirannya.
- d. Hubungan sesama anggota masyarakat lebih intim daripada di kota, serta jumlah anak yang ada dalam keluarga inti lebih besar.

Sedangkan, berdasarkan surat penyempurnaan tipologi dan klasifikasi tingkat perkembangan desa 1987 yang telah diperbarui melalui Permendagri No. 12 Tahun 2007 dikemukakan bahwa karakteristik sosial yang mempengaruhi terhadap perkembangan desa, antara lain:

- Kesehatan Masyarakat
- Pendidikan Masyarakat

1. Variabel Kesehatan Masyarakat yang meliputi;

Variabel ini menilai keberhasilan tingkat kesehatan di suatu desa. Untuk menilai variabel tersebut terdapat beberapa data yang perlu dicari. Berdasarkan Permendagri No. 12 Tahun 2007 cara penilaian perkembangan suatu desa, yaitu dengan memberikan skor pada variabel kesehatan. Variabel kesehatan ini terdiri dari beberapa variabel yang perlu dikaji berdasarkan Permendagri No. 12 Tahun 2007, yaitu kualitas ibu hamil; kualitas bayi; kualitas persalinan; cakupan imunisasi; perkembangan perkawinan usia subur; wabah penyakit; angka harapan hidup; cakupan pemenuhan kebutuhan air bersih; perilaku hidup sehat; status gizi; jenis penyakit dan tempat perawatan penderita sakit tahun ini; perkembangan sarana dan prasarana kesehatan.

Pada penelitian ini tidak semua variabel tersebut digunakan dalam mengukur tingkat kesehatan, Variabel yang digunakan pada penelitian ini disesuaikan dengan batasan pembahasan pada penelitian. Variabel yang digunakan pada penelitian ini, antarlain

1. Kualitas persalinan
2. Perkembangan perkawinan usia subur (KB)
3. Jenis penyakit dan tempat perawatan penderita

Pada Tabel 2.1 merupakan penjelasan dari variabel yang digunakan dalam penelitian beserta penjelasan cara mengukur perkembangan desa berdasarkan Permendagri No.12 Tahun 2007. Namun pada penelitian ini tidak dilakukan proses pengukuran (skoring) berdasarkan

permendagri tersebut, melainkan hanya mengambil variabel yang akan dianalisis menggunakan analisis korelasi pada penelitian.

**Tabel 2.1 Variabel Kesehatan**

No	Variabel	Cara Penilaian	Skor
A.	Kualitas persalinan		
1.	Pertolongan persalinan	Kurang dari 10%	3
a.	Pertolongan Dokter, Bidan dan Perawat	10-25%	4
		25-50%	5
		Lebih dari 50%	6
b.	Persalinan yang ditolong	Kurang dari 10%	5
c.	Dukun bersalin	10-25%	4
		25-50%	3
		Lebih dari 50%	2
d.	Jumlah persalinan yang ditolong keluarga	Kurang dari 10%	4
		10-25%	3
		25-50%	2
		Lebih dari 50%	1
B.	Perkembangan pasangan usia subur		
1.	Keluarga Berencana	Kurang dari 10%	3
a)	Jumlah pengguna metode Kontrasepsi	10-25%	4
		25-50%	5
		50-75%	6
		Lebih dari 75%	8
b)	Jumlah PUS yang tidak menggunakan metode KB	Kurang dari 10%	7
		10-25%	6
		25-50%	5
		50-75%	4
		Lebih dari 75%	3
C.	Jenis Penyakit		
1.	Jenis penyakit yang diderita	Tidak ada	10
		Kurang dari 2 jenis	4
		3-4 jenis	3
		5-7 jenis	2
		7-10 jenis	1
		Lebih dari 10 jenis	0

Sumber: Permendagri No 12 tahun 2007

## 2. Variabel pendidikan

Variabel ini menilai keberhasilan tingkat pendidikan di suatu desa. Untuk menilai variabel tersebut terdapat beberapa data yang perlu dicari. Berdasarkan Permendagri No. 12 Tahun 2007 cara penilaian perkembangan suatu desa, yaitu dengan memberikan skor pada variabel pendidikan. Variabel pendidikan ini terdiri dari beberapa variabel yang perlu dikaji berdasarkan Permendagri No. 12 Tahun 2007, antara lain tingkat pendidikan penduduk; wajib belajar 9 tahun; rasio guru dan murid; kelembagaan pendidikan;

Pada penelitian ini tidak semua variabel pendidikan tersebut digunakan dalam mengukur tingkat pendidikan, hal ini dikarenakan dilakukan penyesuaian dengan batasan pembahasan penelitian. Pada Tabel 2.2 merupakan beberapa variabel yang digunakan dalam

penelitian beserta penjelasan cara mengukur perkembangan desa berdasarkan Permendagri No.12 Tahun 2007. Namun, pada penelitian ini tidak dilakukan skoring, melainkan hanya mengambil variabel berdasarkan permendagri yang kemudian akan di analisis sesuai pembahasan pada penelitian. Maka, variabel penelitian yang diambil dari variabel pendidikan berdasarkan permendagri adalah tingkat pendidikan (pendidikan formal) dan kelembagaan pendidikan (pendidikan informal).

**Tabel 2. 2 Variabel Pendidikan**

No	Variabel	Cara Penilaian	Skor
A	Tingkat Pendidikan penduduk		
1.	Jumlah penduduk buta aksara dan huruf latin	jika tidak ada jika ada namun kurang dari 10% 10-25% 25-50% 50-75% Lebih dari 75%	10 9 6 2 1 0
2.	Jumlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan kelompok bermain angka	jika tidak ada jika ada namun kurang dari 10% 10-25% 25-50% 50-75% Lebih dari 75%	1 2 4 5 6 7
3.	Jumlah penduduk tidak tamat SD/ sederajat	jika penduduk tidak tamat sd/ sederajat kurang dari 1% 1-5% 5-10% 10-15% Lebih dari 15%	5 4 3 2 0
4.	Jumlah penduduk tamat SLTP/ sederajat	Jika kurang dari 1% 1-10% 10-15% 15-25% 25-50% 50-75% Lebih dari 75%	1 2 3 4 5 6 7
5.	Jumlah penduduk tamat SLTA/ sederajat	Jika kurang dari 1% 1-10% 10-15% 15-25% 25-50% 50-75% Lebih dari 75%	1 3 4 5 6 7 8
6.	Jumlah penduduk tamat Diploma	Kurang dari 1% 1-10% 10-15% 15-25% 25-50% 50-75% Lebih dari 75%	3 4 5 6 7 8 9
7.	Jumlah penduduk tamat S1, S2, S3	Kurang dari 1% 1-10% 10-15% 15-25%	4 5 6 7

No	Variabel	Cara Penilaian	Skor
		25-50%	8
		50-75%	9
		Lebih dari 75%	10
B.	Kelembagaan pendidikan		
1.	Jumlah perpustakaan desa/kelurahan	Tidak ada Kurang 1 unit 2-5 unit Lebih dari 5	0 5 7 9
2.	Jumlah taman bacaan desa / kelurahan	Tidak ada Kurang 1 unit 2-5 unit Lebih dari 5	0 5 6 10
3.	Jumlah perpustakaan keliling	Tidak ada Kurang 1 unit 2-5 unit Lebih dari 5	0 7 8 10
4.	Jumlah sanggar belajar	Tidak ada Kurang 1 unit 2-5 unit Lebih dari 5	0 5 7 9
5.	Jumlah kegiatan lembaga pendidikan luar desa	Tidak ada Kurang 1 unit 2-5 unit Lebih dari 5	0 4 8 10
6.	Jumlah kelompok belajar paket A, B dan C	Tidak ada Kurang dari 4 kelompok 5-8 kelompok Lebih dari 8 kelompok	0 5 7 9
7.	Jumlah lembaga kursus keterampilan	Tidak ada 1 unit 2-5 unit 6-8 unit 9-10 unit Lebih dari 10 unit	0 6 7 8 9 10

Sumber: Permendagri No 12 tahun 2007

### 2.2.3 Kondisi Perekonomian Desa

Ekonomi adalah ilmu yang mengenai asas-asas produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti keuangan, perindustrian dan perdagangan (KBBI,1996:251). Ilmu ekonomi adalah studi tentang bagaimana individu dan masyarakat menentukan pilihan penggunaan sumber daya yang langka yang telah disediakan oleh alam dan generasi sebelumnya (Case, 2006:2). Pada penelitian ini pengertian ekonomi dibatasi terhadap pilihan individu ataupun kelompok dalam penggunaan ataupun pemakaian kekayaan khususnya *remittance* untuk berbagai kegiatan.

Kawasan pedesaan merupakan kawasan yang memiliki kegiatan utama di sektor pertanian, namun pertanian yang ada di pedesaan sangat Beragam. Menurut Soedrajat (1997) kegiatan perekonomian dibedakan menjadi tiga sektor, antara lain

- a. Sektor pertumbuhan primer, yaitu sektor atau kegiatan ekonomi yang menciptakan pertumbuhan pesat dan menciptakan kekuatan ekspansi ke berbagai sektor lain dalam perekonomian
- b. Sektor pertumbuhan suplementer, yaitu sektor yang berkembang dengan cepat sebagai akibat langsung dari perkembangan di sektor pertumbuhan primer
- c. Sektor pertumbuhan terkait, yaitu sektor atau ekonomi yang berkembang seiring dengan pendapatan, penduduk dan produksi sektor industri

Sedangkan berdasarkan Asy'ari (1993) dengan karakteristik ekonomi desa maka terdapat beberapa tipe desa berdasarkan sektor ekonomi utama dan komoditas basis pertanian.

Tipe tersebut antara lain

- 1) Tipe Desa Nelayan. Desa yang sebagian besar kehidupan penduduknya bergantung pada potensi laut.
- 2) Tipe Desa Persawahan adalah desa yang sebagian besar kehidupan penduduknya bergantung pada potensi pertanian sawah, baik yang berpengairan teknis, non teknis maupun tadah hujan
- 3) Tipe Desa Perladangan adalah desa yang sebagian besar kehidupan penduduknya bergantung pada potensi pertanian tanah kering baik ditanami padi maupun palawija.
- 4) Tipe Desa Perkebunan adalah desa yang sebagian besar kehidupan penduduknya bergantung pada potensi pertanian tanaman keras dan monokultur
- 5) Tipe Desa Peternakan adalah desa yang sebagian besar kehidupan penduduknya bergantung pada potensi peternakan
- 6) Tipe Desa kerajinan/industri kecil adalah desa yang sebagian besar kehidupan penduduknya bergantung pada potensi industri kecil atau kerajinan.
- 7) Tipe Desa industri sedang dan besar adalah desa yang sebagian besar kehidupan penduduknya bergantung pada potensi industri sedang dan besar
- 8) Tipe Desa jasa dan perdagangan adalah desa yang sebagian besar kehidupan penduduknya bergantung pada potensi perdagangan dan jasa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2007 mengenai Panduan Teknis Pengolahan data Profil Desa dan Kelurahan, dikemukakan bahwa variabel

perekonomian desa yang mempengaruhi terhadap perkembangan desa, antara lain; kesejahteraan keluarga; variabel pendapatan domestic desa/kelurahan Bruto (PDD/KB); variabel tingkat pendapatan desa perkapita; struktur mata pencaharian menurut sektor; penguasaan asset ekonomi masyarakat; asset perumahan; pemilikan ekonomi lainnya.

Pada penelitian ini tidak semua variabel tersebut digunakan dalam mengukur tingkat perekonomian masyarakat, variabel yang digunakan disesuaikan dengan batasan pembahasan pada penelitian. Pada Tabel 2.3, 2.4 dan 2.5 dijelaskan beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian beserta penjelasan cara mengukur perkembangan desa berdasarkan Permendagri No.12 Tahun 2007. Namun, pada penelitian ini tidak dilakukan skoring berdasarkan peraturan tersebut, melainkan hanya mengambil variabel yang akan digunakan pada analisis korelasi pada penelitian. Maka, variabel yang digunakan pada penelitian antara lain:

1. Penguasaan asset ekonomi masyarakat
  - Asset tanah
  - Asset sarana transportasi umum

**Tabel 2. 3 Variabel asset ekonomi masyarakat**

No	Variabel	Cara Penilaian	Skore
1.	Asset ekonomi masyarakat		
A.	Aset Tanah	Jika jumlah penduduk yang memiliki variabel kurang dari 10% dari jumlah total:	a) 2
		10-25%	b) 4
		25-50%	c) 6
		50-75%	d) 8
		Lebih dari 75%	e) 10
B.	Aset sarana transportasi umum	a) Jika jumlah penduduk yang memiliki variabel kurang dari 5% dari jumlah total:	a) 0
		b) 5-10%	b) 3
		c) 10-25%	c) 4
		d) 25-50%	d) 5
		e) Lebih dari 50%	e) 6
	d. Perahu dayung, kapal motor, dan angkutan laut/sungai lainnya	f) 10	

Sumber: Permendagri No 12 tahun 2007

2. Asset perumahan

**Tabel 2. 4 Variabel asset perumahan masyarakat**

No	Variabel	Cara Penilaian	Skore	
2.	Asset perumahan			
A.	Rumah menurut dinding	Jika tidak ada.	2	
		1. Tembok	Jika kurang 5% dari total rumah	3
		5-10%	4	

No	Variabel	Cara Penilaian	Score
		15-20%	5
		20-25%	6
		25-50%	7
		50-75%	8
		Lebih dari 75%	9
		Jika tidak ada	9
2.	Kayu	Jika kurang dari 5% dari total rumah	8
		5-10%	7
		15-20%	6
		20-25%	5
		25-50%	4
3.	Bambu	50-75%	3
		Lebih dari 75%	2
		Jika tidak ada	10
4.	Tanah liat	kurang dari 5% dari total rumah	4
		5-10%	3
		15-25%	2
		Lebih dari 25%	1
		Jika tidak ada	10
		kurang dari 5% dari total rumah	6
		5-10%	5
5.	Pelapah kelapa/lontar dan dedaunan	15-20%	4
		20-25%	3
		25-50%	2
		50-75%	1
		Lebih dari 75%	0
		Jika tidak ada	2
		kurang dari 5% dari total jumlah rumah yang ada	3
B	Rumah Menurut Lantai	ada	
	1. Keramik	5-10%	4
	2. Semen	15-20%	5
	3. Kayu	20-25%	6
	4. Tanah	25-50%	7
		50-75%	8
		Lebih dari 75%	9
		Jika tidak ada	2
		kurang dari 5%	3
C.	Rumah menurut atap		
	1. Genteng	5-10%	4
	2. Seng	15-20%	5
		20-25%	6
		25-50%	7
		50-75%	8
		Lebih dari 75%	9
		Jika tidak ada	8
		kurang dari 5%	7
		5-10%	6
	3. Asbes	15-20%	5
		20-25%	4
		25-50%	3
		50-75%	2

No	Variabel	Cara Penilaian	Skore
4.	Beton	Lebih dari 75%	1
		Jika tidak ada	2
		Jika jumlah rumah atap beton kurang dari 5%	3
		5-10%	4
		15-20%	5
		20-25%	6
		25-50%	7
		50-75%	8
		Lebih dari 75%	9
5.	Kayu dan Bambu	Jika tidak ada	9
		Jika jumlah rumah atap kayu dan bambu kurang dari 5%	8
		5-10%	7
		15-20%	6
		20-25%	5
		25-50%	3
		50-75%	2
		Lebih dari 75%	1
		6.	Daun lontar, gebang ilalang dan dedaunan lain
kurang dari 5% dari total jumlah rumah yang ada	8		
5-10%	7		
15-20%	6		
20-25%	5		
25-50%	3		
50-75%	2		
Lebih dari 75%	1		

Sumber: Permendagri No 12 tahun 2007

### 3. Pemilikan ekonomi lainnya (usaha barang dan jasa)

**Tabel 2.5 Variabel aset ekonomi masyarakat**

No	Variabel	Cara Penilaian	Skore
1	Sebaran jumlah jenis aset ekonomi lainnya	Bila tidak ada penduduk desa/kelurahan ini	0
		Bila jumlah jenis aset kurang dari 2 jenis	1
		3 – 5 jenis	2
		6 – 8 jenis	3
		9 – 10 jenis	4
		11 – 15 jenis	5
		16 – 20 jenis	6
		21 – 30 jenis	7
		Lebih dari 30 jenis	8
		2	Sebaran pemilik berbagai aset
Bila jumlah penduduk yang memiliki aset kurang dari 1%	2		
1 – 5% dari total jumlah penduduk	3		

No	Variabel	Cara Penilaian	Skore
		5 – 10%	4
		10 – 15%	5
		15 – 25%	6
		25 – 50%	7
		50 – 75%	8
		Lebih dari 75%	9

Sumber: Permendagri No 12 tahun 2007

#### 2.2.4 Infrastruktur Desa

Infrastruktur adalah aset fisik yang dirancang dalam sistem sehingga memberikan pelayanan publik yang penting (Kodoatie, 2003). Sedangkan menurut Grigg dalam kodoatie (2004) infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Sedangkan sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat (Grigg dalam kodoatie, 2004).

Menurut Hanafie (2010: 158), adanya infrastruktur pedesaan khususnya infrastruktur ekonomi yang memadai sangat diperlukan karena merupakan prakondisi bagi tumbuh kembangnya kegiatan agribisnis dan perekonomian secara umum di pedesaan. Infrastruktur pedesaan secara umum mencakup system pengairan, pasar komoditas pertanian, jalan raya, kelistrikan dan jaringan telekomunikasi. Untuk memberikan batasan pembahasan pada penelitian ini, maka variabel yang digunakan, antara lain

##### a. Sistem pengairan

Pembangunan jaringan irigasi skala besar membutuhkan dana investasi yang sangat besar. Oleh karena itu, pembangunan system pengairan haruslah diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat local secara bersama-sama. Mengingat adanya keterbatasan anggaran pembangunan pemerintah maka alternatif lain yang dapat ditempuh adalah mendorong petani dan pengusaha untuk membangun sumber air sendiri, seperti pompa air tanah atau jaringan irigasi sederhana swakelola.

b. Jalan raya

Jalan raya dibutuhkan untuk membuka perekonomian desa sehingga tercipta perdangan dan perekonomian di luar desa. Sistem jalan yang efisien sangat diperlukan ntuk meminimumkan biaya pemasaran. Sistem jalan raya yang efisien mutlak dieprlukan bagi pertumbuhan dan perkembanag agribisnis.

c. Kelistrikan

Kelistrikan merupakan sumber tenaga dan penerangan yang sangat esensial unuk agroindustri, serta berbagai alat dan mesin pertanian. Pembangunan kelistrikan pedesaan sangat diperlukan untuk memacu pertumbuhan dan perkembanag agribisnis perekonomian desa secara umum dan kenyamanan hidup penduduk desa.

d. Jaringan telekomunikasi

Jaringan telekomunikasi diperlukan untuk memperlancar lalu lintas informasi antara desa dan luar desa. Jarongan telekomunikasi bermanfaat untuk mengurangi distorsi informasi pasar dan teknologi. Telekomunikasi

Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2007 mengenai Panduan Teknis Pengolahan data Profil Desa dan Kelurahan, dikemukakan bahwa variabel potensi sarana dan prasarana yang mempengaruhi terhadap perkembangan desa adalah Transportasi; Komunikasi dan informasi; Air bersih dan sanitasi; Irigasi; Pemerintahan desa/kelurahan; Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan; Peribadatan; Olahraga; Kesehatan; Pendidikan; Energy dan penerangan; Hiburan dan wisatadan Kebersihan.

Pada penelitian ini, tidak semua variabel tersebut digunakan sebagai variabel pemanfaatan remittance. Penggunaan variabel disesuaikan dengan batasan pembahasan penelitian. Variabel yank digunakan pada penelitian berdasarkan Permendagri No 12 Tahun 2007, antara lain

- Transprotasi (Jalan)
- Komunikasi dan informasi
- Air bersih dan sanitasi
- Irigasi
- Peribadatan
- Energy dan penerangan

- Kebersihan

### 1. Transportasi

Tabel 2.6 merupakan penjelasan dari beberapa variabel berdasarkan Permendagri No12 Tahun 2007 yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan batasan pembahasan. Namun, pada penelitian ini tidak dilakukan proses skoring seperti yang dilakukan berdasarkan permendagri No 12 tahun 2007, melainkan hanya mengambil variabel berdasarkan peraturan tersebut.

**Tabel 2. 6 Variabel Penilaian Transportasi**

Potensi Variabel Transportasi	Cara Penilaian	Skore
<b>Transportasi Darat</b>		
1. Jalan Desa/Kelurahan	Total panjang jalan rusak	7
	Kurang dari 1% total panjang jalan	6
	1-5%	5
	5-10%	4
	10-25%	3
	25-50%	2
	Lebih dari 50% total panjang jalan	1
2. Jalan antar desa	Total panjang jalan rusak	
3. Jalan Kabupaten/kota yang melewati desa/kelurahan	Kurang dari 1% total panjang jalan	5
4. Jalan provinsi yang melewati desa/kelurahan	1-5%	4
	5-10%	3
5. Jalan negara yang melewati desa/kelurahan	10-25%	2
	25-50%	1
	Lebih dari 50% total panjang jalan	0
6. Jembatan desa/kelurahan	Kurang dari 1%	5
7. Prasarana dan sarana angkutan darat	1-5%	4
	5-10%	3
	10-25%	2
	25-50%	1
	Lebih dari 50% total panjang jalan	0
8. Sarana Transportasi darat	Tidak ada	0
a. Jenis sarana transportasi darat	Kurang dari 2 jenis	3
	2-5 jenis	6
	5-7 jenis	8
	Lebih dari 7 jenis sarana angkutan	9
b. Jumlah sarana transportasi darat	Tidak ada	0
	Kurang dari 5 unit	5
	5-25 unit	6
	25-50 unit	7
	50-100 unit	8
	Lebih dari 100 unit	9

Sumber: Permendagri No 12 tahun 2007

## 2. Komunikasi dan informasi

Berikut merupakan penjelasan dari variabel sarana komunikasi dan informasi yang bisa menjadi potensi untuk perkembangan desa beserta cara penilaian skor sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No 12 Tahun 2007. Namun, pada penelitian ini tidak dilakukan proses scoring seperti yang tertera pada Permendagri No 12 Tahun 2007, melainkan hanya menggunakan variabel yang ada.

**Tabel 2. 7 Variabel sarana komunikasi dan informasi**

No	Potensi variabel sarana komunikasi dan informasi	Penilaian	Skore	
1.	Jenis prsarana telepon umum, warnet dan wartel	Tidak ada	0	
		Kurang dari 2 unit	5	
		2-4 unit	6	
		4-7 unit	7	
		7-10 unit	8	
		Lebih dari 10 unit	9	
2.	Jumlah pelanggan Telkom GSM. CDMA	Tidak ada	0	
		Kurang dari 250 pelanggan	3	
		250-500 pelanggan	4	
		500-1000 pelanggan	5	
		1000-5000 pelanggan	6	
		5000-10000	7	
3.	Sinyal telepon seluler	Bila ada	10	
		Bila tidak ada	0	
4.	Kantor pos	Bila pegawai/tukang pos desa/kelurahan tidak ada	0	
		Ada	5	
5.	Radio dan TV	Bila tidak ada	0	
		a. Milik umum	Bila ada	5
		b. Milik pribadi:		
6	1) Jumlah TV 2) Jumlah Radio 3) Antene 4) Parabola	Bila tidak ada	0	
		Bila jumlahnya kurang dari 10%	5	
		10-25%	6	
		25-50%	7	
		50-75%	8	
		Lebih dari 75%	9	
5)	Koran. Majalah, Buletin	Bila tida ada	0	
		6) Papan iklan/pengumuman	Bila ada	5

Sumber: Permendagri No 12 tahun 2007

## 3. Air bersih dan sanitasi

Berikut merupakan penjelasan dari prasarana air bersih dan sanitasi yang bisa menjadi potensi untuk perkembangan desa beserta cara penilaian skor sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No 12 Tahun 2007. Namun pada penelitian ini tidak dilakukan proses scoring seperti

yang dilakukan pada Permendagri No 12 Tahu 2007, melainkan hanya mengambil variabel yang ada untuk dianalisis berdasarkan pembahasan penelitian.

**Tabel 2. 8 Variabel Prasarana air bersih dan sanitasi**

No	Potensi variabel prasarana air bersih dan sanitasi	Penilaian	Skore
<b>A Prasarana air bersih</b>			
1.	Jumlah sumur pompa, sumur gali dan penampung air hujan, mata air	Tidak ada	0
		Kurang dari 1% dari total prasarana air bersih	2
		1-10%	3
		10-15%	4
		15-25%	5
		Lebih dari 25%	6
2.	Jumlah hidran umum, tangki air bersih dan bangunan/depot pengolahan air minum	bila jumlahnya: Tidak ada	0
		Kurang dari 1% dari total prasarana air bersih	3
		1-10%	4
		10-15%	5
		15-25%	6
		Lebih dari 25%	7
<b>B Sanitasi</b>			
1.	Saluran drainase/saluran pembuangan air limbah	Bila tidak ada	9
		Bila ada	5
2.	Sumur resapan air rumah tangga	Bila tidak ada	0
		Kurang dari 10% dari total keluarga	2
		10-25%	4
		25-50%	6
		50-75%	8
3.	Jumlah MCK umum	Bila tidak ada	0
		Kurang dari 5 unit	2
		5-10 unit	4
		10-20 unit	5
4.	Jamban Keluarga	Bila tidak ada	0
		Kurang dari 10% dari total keluarga	2
		10-25%	4
		25-50%	6
5.	Kondisi Saluran Drainase/saluran pembuang limbah	50-75%	8
		Bila lebih dari 75%	10
		Bila kondisi saluran drainase atau Saluran pembuangan air limbah rusak: Kurang dari 10% dari jumlah saluran yang ada	4
		10 – 25%	3
6.	Kondisi Saluran drainase/saluran pembuang limbah	25 – 50%	2
		Lebih dari 50%	1
		Bila kondisi saluran drainase atau Saluran pembuangan air limbah baik: Kurang dari 10% dari jumlah saluran yang ada	2
		10 – 25%	3
7.	Kondisi Saluran drainase/saluran pembuang limbah	25 – 50%	4
		Lebih dari 50%	5

No	Potensi variabel prasarana air bersih dan sanitasi	Penilaian	Skore
		Lebih dari 50% dalam keadaan baik dari jumlah saluran yang ada	5

Sumber: Permendagri No 12 tahun 2007

#### 4. Irigasi

Berikut merupakan penjelasan dari prasarana dan kondisi irigasi yang bisa menjadi potensi untuk perkembangan desa beserta cara penilaian skor sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No 12 Tahun 2007. Namun, pada penelitian ini tidak dilakukan proses skoring, melainkan hanya mengambil variabel yang akan dianalisis sesuai pembahasan penelitian.

**Tabel 2. 9 Variabel Prasarana dan kondisi irigasi**

No	Potensi indicator prasarana dan kondisi irigasi	Penilaian	Skore
1	Kondisi saluran primer	Bila Kondisibaik	5
2	Panjang saluran sekunder	Bila kondisi indicator rusak:	
3	Panjang saluran tersier	Kurang dari 10%	4
4	Jumlah pintu sadap	10-25%	3
5	Jumlah pintu pembagi air	25-50%	2
		Lebih dari 50%	1

Sumber: Permendagri No 12 tahun 2007

#### 5. Peribadatan

Berikut merupakan penjelasan dari prasarana peribadatan yang bisa menjadi potensi untuk perkembangan desa beserta cara penilaian skor sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No 12 Tahun 2007. Namun, pada penelitian ini tidak dilakukan proses skoring, melainkan hanya mengambil variabel yang ada pada Permendagri No 12 Tahun 2007 untuk dijadikan variabel pada penelitian ini.

**Tabel 2. 10 Variabel prasarana peribadatan**

No	Potensi variabel prasarana peribadatan	Penilaian	Skore
1.	Jumlah masjid	Bila tidak ada	0
2.	Julah langgar	Jika ada jumlahnya kurang dari 2 buah	2
		3-5 buah	3
		5-10 buah	4
		Lebih dari 10 buah	5
3.	Jumlah gereja Kristen	Bila tidak ada	0
4.	Jumlah Gereja Katolik	Jika ada jumlahnya kurang dari 2 buah	3
5.	Jumlah wihara	3-5 buah	4
6.	Jumlah pura	Lebih dari 5 buah	5
7.	Jumlah klenteng		

Sumber: Permendagri No 12 tahun 2007

## 6. Energy dan penerangan

Berikut merupakan penjelasan dari prasarana energy dan penerangan yang bisa menjadi potensi untuk perkembangan desa beserta cara penilaian skor sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No 12 Tahun 2007. Namun, pada penelitian ini tidak dilakukan proses scoring, melainkan hanya mengambil variabel yang ada pada Permendagri No 12 Tahun 2007 untuk dianalisis pada penelitian ini.

**Tabel 2. 11 Variabel prasarana energy dan penerangan**

No	Potensi variabel prasarana energy dan penerangan	Penilaian	Skore
1.	Listrik PLN	Bila tidak ada	0
2.	Diesel Umum	Bila ada	5
3.	Genset Pribadi		
4.	Lampu Minyak Tanah/jarak		
5.	Kayu Bakar		
6.	Batu Bara		
7.	Tanpa Penerangan		

Sumber: Permendagri No 12 tahun 2007

## 7. kebersihan

Berikut merupakan penjelasan dari prasarana dan sarana kebersihan yang bisa menjadi potensi untuk perkembangan desa beserta cara penilaian skor sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No 12 Tahun 2007. Namun, pada penelitian ini tidak dilakukan proses scoring, melainkan hanya mengambil variabel yang ada pada Permendagri No 12 Tahun 2007 tersebut untuk dianalisis sesuai pembahasan penelitian.

**Tabel 2. 12 Variabel prasarana dan sarana kebersihan**

No	Potensi variabel prasarana dan sarana kebersihan	Penilaian	Skore
1.	Tempat Pembuangan Sementara	Bila tidak ada	0
2.	Tempat Pembuangan Akhir	Bila ada	5
3.	Akhir Penghancur Sampah		
4.	Jumlah gerobak sampal		
5.	Jumlah tong sampal		
6.	Jumlah truck pengangkut sampah		
7.	Satgas kebersihan		
8.	Jumlah anggotan satgas kebersihan		
9.	Satgas pemulung		
10.	Tempat pengolahan sampah		
11.	Pengelola sampah	Pemerintah	5
		Swasta	7
		swadaya	9
12.	Pengelola sampah lainnya	Bila tidak ada	0
		Bila ada	5

Sumber: Permendagri No 12 tahun 2007

## 2.3 TKI

### 2.3.1 Definisi TKI

Pada umumnya tenaga kerja di anggap sebagai pekerja yang hanya mengandalkan tenaga fisik dalam tugasnya. Namun, menurut Handono (2003:6) tenaga kerja merupakan kemampuan seseorang untuk mengeluarkan usaha pada tiap satuan waktu guna menghasilkan sesuatu baik berupa barang atau jasa, yang digunakan baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Sedangkan, tenaga kerja Indonesia (TKI) adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. (UU RI No.39 Tahun 2004). Oleh karena itu tenaga kerja Indonesia merupakan para pekerja yang bekerja di luar negeri baik secara legal ataupun illegal.

### 2.3.2 Manfaat Bekerja Di Luar Negeri Bagi TKI

Bekerja sebagai TKI memberikan keuntungan bagi TKI ataupun negara. Berikut merupakan manfaat yang didapatkan dan diberikan oleh TKI. (Zuhdi, 2002:19)

1. Dapat mengurangi angka pengangguran. Keberadaan TKI membantu pemerintah mengurangi pengangguran di dalam negeri dan sebagai penghasil devisa bagi negara
2. TKI memiliki kesempatan untuk mempraktekan kemampuan bahasa asing dan memperdalam belajar bahasa asing di negara tujuan.
3. TKI secara tidak langsung turut menghambat laju pertumbuhan penduduk Indonesia karena dengan semakin banyaknya orang yang bekerja di luar negeri maka angka pernikahan dalam negeri yang menghasilkan keturunan akan terhambat
4. Dengan bekerja di luar negeri, terbuka peluang bagi para TKI menjadi duta pariwisata untuk turut mempromosikan pariwisata Indonesia.\
5. Terbuka peluang untuk membuka usaha di negeri sendiri, berwiraswasta menciptakan lapangan pekerjaan baru di dalam negeri sendiri dengan menggunakan uang hasil bekerja di luar negeri.

## 2.4 Remittance

### 2.4.1 Definisi Remittance

Masyarakat menjadi TKI untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik bagi dirinya dan Menurut hugo dalam Subianto (2006: 36) *Remittance* merupakan uang yang dikirim ke

desa selama pelaku mobilitas tidak berada di desa. Sedangkan, menurut Connell dalam Junaedi (2006), *remittance* adalah uang atau barang yang dikirim oleh migrant ke daerah asal, sementara migrant masih berada di daerah tujuan. Namun, pengertian ini terus mengalami perluasan, sehingga bukan hanya pengiriman uang dan barang tetapi juga ide-ide baru dan keterampilan yang sudah didapatkan. Berdasarkan definisi dari beberapa sumber tersebut dijelaskan jika *remittance* bisa berupa uang, barang, ide-ide baru dan keterampilan dari TKI, namun pada penelitian ini hanya membahas *remittance* berupa uang yang dikirim oleh TKI ke daerah asal.

#### 2.4.2 Tujuan Utama *Remittance*

Pengiriman *remittance* bisa memberikan dampak terhadap pembangunan di daerah asal. Berikut merupakan tujuan *remittance* (Junaedi, 2006: 29)

a. Kebutuhan hidup sehari-hari keluarga

Sejumlah besar remitan yang dikirim oleh migran berfungsi untuk menyokong kerabat/keluarga migran yang ada di daerah asal. Migran mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengirimkan uang/barang untuk menyokong biaya hidup sehari-hari dari kerabat dan keluarganya, terutama untuk anak-anak dan orang tua

b. Peringatan hari-hari besar yang berhubungan dengan siklus hidup manusia

Di samping mempunyai tanggung jawab terhadap kebutuhan hidup sehari-hari keluarga dan kerabatnya, seorang migran juga berusaha untuk dapat pulang ke daerah asal pada saat diadakan peringatan hari-hari besar yang berhubungan dengan siklus hidup manusia, misalnya kelahiran, perkawinan, dan kematian. Menurut Curson dalam junaedi (2006), pada saat itulah jumlah remitan yang dikirim atau ditinggalkan lebih besar daripada hari-hari biasa.

c. Investasi

Bentuk investasi adalah perbaikan dan pembangunan perumahan, membeli tanah, mendirikan industri kecil, dan lain-lainnya. Kegiatan ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sebagai sarana sosial dan budaya dalam menjaga kelangsungan hidup di daerah asal, tetapi juga bersifat psikologis, karena erat hubungannya dengan prestise seseorang.

d. Jaminan hari tua

Migran mempunyai keinginan, jika mereka mempunyai cukup uang atau sudah pensiun, mereka akan kembali ke daerah asal. Hal ini erat kaitannya dengan fungsi

investasi, mereka akan membangun rumah atau membeli tanah di daerah asal sebagai simbol kesejahteraan, prestisius, dan kesuksesan di daerah rantau. Lee dalam junaedi (2006) mengemukakan bahwa berbagai pengalaman baru yang diperoleh di tempat tujuan, apakah itu keterampilan khusus atau kekayaan, sering dapat menyebabkan orang kembali ke tempat asal dengan posisi yang lebih menguntungkan. Selain itu, tidak semua yang bermigrasi bermaksud menetap selama-lamanya di tempat tujuan.

#### 2.4.3 Manfaat Atau Dampak Adanya *Remittance*

*Remittance* memberikan berbagai manfaat baik secara langsung ataupun tidak langsung. Semakin sering dan tinggi *remittance* yang dikirim maka manfaat yang didapatkan pun akan semakin tinggi. Berikut merupakan manfaat atau dampak positif yang diperoleh dengan adanya *remittance*. (ratha & mohaprata, 2007)

a. *remittance* selalu stabil bahkan meningkat sehingga membantu kestabilan perekonomian

Tidak seperti arus modal swasta, pengiriman uang selalu stabil bahkan cenderung naik ketika penerima menderita permasalahan/ penurunan ekonomi setelah krisis keuangan, bencana alam, atau politik. Migran mengirim dana lebih selama masa-masa sulit untuk membantu keluarga mereka dan teman-teman. *Remittance* memberikan kontribusi terhadap kestabilan perekonomian dengan kompensasi untuk kerugian valuta asing yang terjadi pada makroekonomi

b. *remittance* mengurangi kemiskinan dalam ekonomi penerima

*Remittance* akan menambah pendapatan rumah tangga penerima. Analisis data survei rumah tangga menunjukkan bahwa pengiriman uang telah mengurangi kemiskinan dan telah menghasilkan pembangunan yang lebih baik pada negara-negara berpenghasilan rendah. Remitansi juga sering digunakan untuk investasi usaha kecil, khususnya di negara-negara dengan iklim investasi yang baik. Remitansi terkait dengan investasi rumah tangga juga bisa meningkatkan pendidikan, kewirausahaan, dan kesehatan penerima *remittance*. Beberapa studi juga menunjukkan bahwa pengiriman uang menyediakan modal untuk pengusaha kecil, mengurangi kendala kredit dan meningkatkan kewirausahaan. Pengiriman uang dari Amerika Serikat menyumbang sekitar seperlima dari modal yang diinvestasikan dalam usaha mikro di perkotaan Meksiko.

c. *remittance* menjanjikan pertumbuhan ekonomi jangka panjang

Sejauh *remittance* digunakan untuk membiayai pendidikan, kesehatan serta meningkatkan investasi, maka *remittance* bisa memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam ekonomi, dimana ketika keuangan mengalami kemunduran maka *remittance* dapat mengurangi kendala kredit dan bertindak sebagai pengganti pembangunan keuangan. Bahkan, ketika penerima *remittance* meningkatkan daya konsumsi maka *remittance* juga semakin meningkat sehingga hal ini dapat meningkatkan pula pendapatan perkapita masyarakat dan mengurangi kemiskinan, kesenjangan bahkan pertumbuhan perekonomian.

- d. Aliran *remittance* yang besar dapat menyebabkan apresiasi nilai tukar dan ekspor yang lebih rendah

Aliran remitansi yang besar dan berkelanjutan dapat menyebabkan apresiasi nilai tukar yang nyata sehingga kerugian dalam daya saing ekspor relatif terjaga,. Meskipun bukti empiris terdapat dampak buruk dari aliran besar devisa pada istilah perdagangan dan pertumbuhan terbatas, namun berpengaruh signifikan untuk beberapa ekonomi kecil di mana pengiriman uang sangat tinggi.

## 2.5 Analisis Korelasi

Metode korelasi spearman rank bisa juga disebut korelasi berjenjang, atau korelasi berpangkat, dan ditulis dengan notasi ( $r_s$ ). Kegunaannya untuk mengukur tingkat atau eratnya hubungan antara dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat yang berskala ordinal, mengetahui tingkat kecocokan dari dua variabel terhadap grup yang sama, mendapatkan validitas empiris (concurrent validity) alat pengumpul data, dan mengetahui reliabilitas (keajekan) alat pengumpul data yang dimodifikasi dengan William Brown sehingga menghasilkan rumus baru yaitu Spearman-Brown bersimbol ( $r_{11}$ )= $2r:1 + 2r$  dan juga untuk mengukur data kuantitatif secara eksakta sulit dilakukan misalnya mengukur tingkat kesukaan (kesenangan), tingkat produktivitas pegawai, tingkat motivasi pegawai, tingkat moralitas pegawai, dan lain-lain.

Metode ini tidak terikat oleh asumsi bahwa populasi yang diselidiki harus berdistribusi normal, data dapat diubah dari data interval menjadi data ordinal. Rumus korelasi spearman rank yang digunakan yaitu (Santoso, 2012:195):

$$r_s = 1 - \frac{6\sum d^2}{n(n^2 - 1)}$$

$r_s$  = nilai korelasi spearman rank

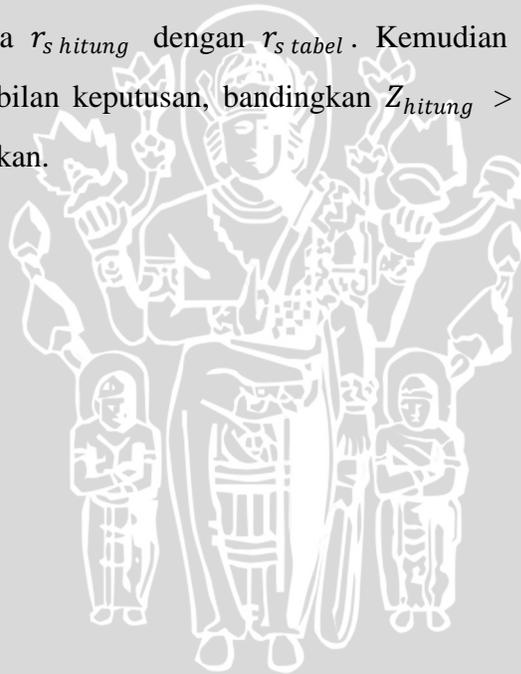
$d^2$  = selisih setiap pasangan rank

$n$  = jumlah pasangan rank untuk spearman ( $5 < n < 30$ )

Bila dilanjutkan untuk mencari signifikan, maka digunakan rumus  $Z_{hitung}$  :

$$Z_{hitung} = \frac{r_s}{\frac{1}{\sqrt{n-1}}}$$

Cara mencari nilai korelasi spearman rank mula-mula dengan membuat hipotesis berbentuk kalimat dan statistik, buat tabel untuk meranking kemudian menghitung nilai  $r_{s\ hitung}$ . Tetapkan dulu taraf signifikan, kemudian mencari nilai tabel r spearman dan membuat perbandingan antara  $r_{s\ hitung}$  dengan  $r_{s\ tabel}$ . Kemudian mencari nilai  $Z_{hitung}$ , buatlah aturan untuk pengambilan keputusan, bandingkan  $Z_{hitung} > Z_{tabel}$ , maka tolak  $H_0$  (signifikan), kemudian simpulkan.



## 2.6 Studi Terdahulu

Tabel 2. 13 Studi Terdahulu

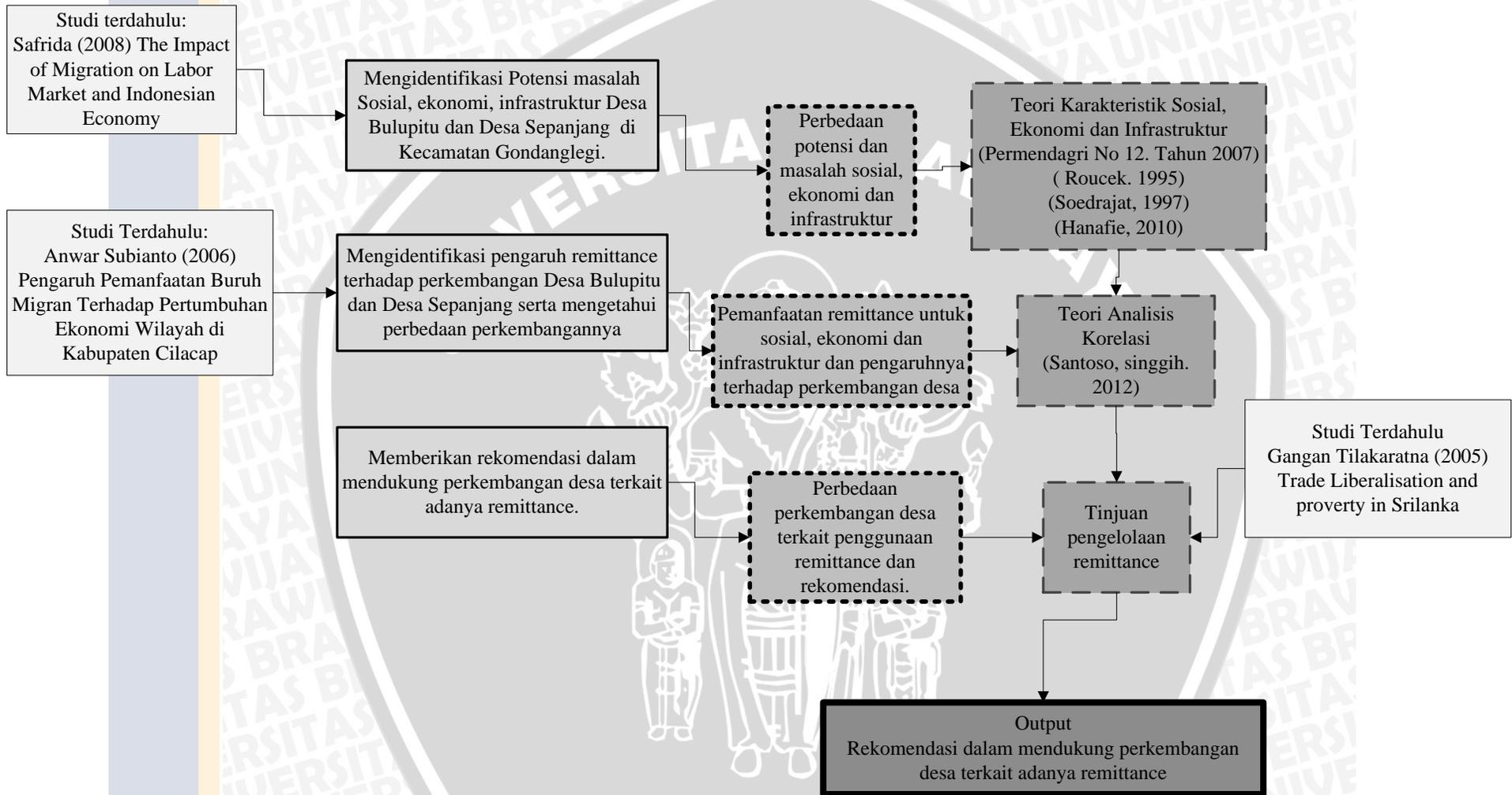
No	Penelitian	Lokasi Studi	Tujuan	Variabel	Metode	Perbedaan penelitian
1	Anwar Subianto (2006) Pengaruh Pemanfaatan Buruh Migran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Kabupaten Cilacap	Kecamatan Adipala, Kecamatan binangun dan Kecamatan Nusawungu	Untuk mengetahui tingkat pengaruh <i>remittance</i> dan pemanfaatannya yang dialokasikan untuk konsumsi, investasi dan tabungan oleh keluarga buruh migran.	PDRB Kecamatan Remittance keluarga buruh migran Perumahan Pendidikan Kesehatan Kesempatan kerja Aksesibilitas	Analisis Korelasi Analisis Statistik - Mean - Media n modus Scoring	Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian kali ini adalah pada pemanfaatan <i>remittance</i> . Pada penelitian terdahulu, pemanfaatan <i>remittance</i> yang diteliti adalah untuk konsumsi, investasi dan tabungan. Sedangkan pada penelitian kali ini, yang diteliti adalah penggunaan <i>remittance</i> lebih luas, yaitu sosial, ekonomi dan infrastruktur. Manfaat penelitian ini, yaitu memberikan informasi mengenai kecenderungan pemanfaatan <i>remittance</i> oleh keluarga TKI.
2.	Safrida (2008) The Impact of Migration on Labor Market and Indonesian Economy	Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendeskripsikan perkembangan migrasi internal dan internasional, pasar kerja dan perekonomian Indonesia.</li> <li>- Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya migrasi internal dan internasional di Indonesia.</li> <li>- Meramalkan dampak penerapan kebijakan migrasi internal dan internasional terhadap pasar kerja dan perekonomian Indonesia pada tahun 2009 – 2012.</li> </ul>	Migran masuk Migran keluar Permintaan tenaga kerja Penawaran tenaga kerja Upah Pendapatan Nasional Pendapatan disposibel Konsumsi RT Investasi Devisa	Analisis MPL Analisis Model Migrasi Konsumsi keynes	Perbedaan penelitian pada studi terdahulu ini dengan penelitian kali ini, yaitu pada penelitian terdahulu lebih menekankan pada fenomena TKI sehingga yang diteliti berupa faktor pendorong TKI serta dampak TKI terhadap perekonomian di Indonesia. Sedangkan pada penelitian kali ini lebih menekankan pada pemanfaatan <i>remittance</i> dan ruang lingkungnya pun hanya desa. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan informasi mengenai fenomena migrasi di Indonesia dan karakteristik wilayah dengan jumlah TKI tinggi.
3.	Gangan Tilakaratra Trade Liberalisation	Srilanka	Untuk meningkatkan pengelolaan <i>remittance</i> yang dikirim TKI	Besaran <i>remittance</i> Proses pengiriman	Modeling and policy impact analysis	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah pada penelitian terdahulu dijelaskan mengenai bagaimana proses pengiriman <i>remittance</i> di srilanka dan pengaruh kebijakan yang da terhadap

No	Penelitian	Lokasi Studi	Tujuan	Variabel	Metode	Perbedaan penelitian
	and proverty in Srilanka			remittance Pengelolaan remittance	(MPIA)	pengelolaan remittance oleh keluarga TKI. Manfaat penelitian terdahulu ini adalah sebagai informasi arahan pengiriman remittance serta pengelolaannya.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



## 2.7 Kerangka Teori



Gambar 2. 1 Kerangka Teori

<b>BAB II</b> .....	12
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	12
<b>2.1 Teori Pertumbuhan Wilayah</b> .....	12
<b>2.1.1 Teori <i>Resource Endowment</i></b> .....	12
<b>2.1.2 Teori <i>Exsport Base</i></b> .....	12
<b>2.1.3 Teori Pertumbuhan Wilayah Neoklasik</b> .....	13
<b>2.1.4 Teori Ketidakseimbangan Pertumbuhan Wilayah</b> .....	13
<b>2.1.5 Teori Baru Pertumbuhan Wilayah</b> .....	14
<b>2.2 Desa</b> .....	14
<b>2.2.1 Desa</b> .....	14
<b>2.2.2 Kondisi Sosial Desa</b> .....	15
<b>2.2.3 Kondisi Perekonomian Desa</b> .....	19
<b>2.2.4 Infrastruktur Desa</b> .....	24
<b>2.3 TKI</b> .....	31
<b>2.3.1 Definisi TKI</b> .....	31
<b>2.3.2 Manfaat Bekerja Di Luar Negeri Bagi TKI</b> .....	31
<b>2.4 <i>Remittance</i></b> .....	31
<b>2.4.1 Definisi <i>Remittance</i></b> .....	31
<b>2.4.2 Tujuan Utama <i>Remittance</i></b> .....	32
<b>2.4.3 Manfaat Atau Dampak Adanya <i>Remittance</i></b> .....	33
<b>2.5 Analisis Korelasi</b> .....	34
<b>2.6 Studi Terdahulu</b> .....	36
<b>2.7 Kerangka Teori</b> .....	38

Tabel 2. 1 Variabel Kesehatan ..... 17

Tabel 2. 2 Variabel Pendidikan ..... 18

Tabel 2. 3 Variabel asset ekonomi masyarakat ..... 21

Tabel 2. 4 Variabel asset perumahanmasyarakat ..... 21

Tabel 2. 5 Variabel asset ekonomi masyarakat ..... 23

Tabel 2. 6 Variabel Penilaian Transportasi ..... 26

Tabel 2. 7 Variabel sarana komunikasi dan informasi ..... 27

Tabel 2. 8 Variabel Prasarana air bersih dan sanitasi ..... 28

Tabel 2. 9 Variabel Prasarana dan kondisi irigasi ..... 29

Tabel 2. 10 Variabel prasarana peribadatan ..... 29

Tabel 2. 11 Variabel prasarana energy dan penerangan ..... 30

Tabel 2. 12 Variabel prasarana dan sarana kebersihan ..... 30

Tabel 2. 13 Studi Terdahulu ..... 36

Gambar 2. 1 Kerangka Teori ..... 38

